ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAANALOKASI DANA DESA

(Studi Kasus Pada Desa Srigunung, Desa Nusa Serasan, dan Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin)

Skripsi



Nama : Ari Irawansyah Nim : 222014332

Nim : 222014552

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 2019

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAANALOKASI DANA DESA

(Studi Kasus Pada Desa Srigunung, Desa Nusa Serasan, dan Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin)

Skripsi

Diajukan Untuk Salah Satu Persyaratan Memeperoleh Gelar Strata Satu Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang



Nama : Ari Irawansyah

Nim : 222014332

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 2019

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRPSI

Judul : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan

Alokasi Dana Desa (Studi kasus pada Desa Srigunung, Desa Nusa Serasan, dan Desa Sumber Rejeki Kabupaten

Musi Banyuasin)

Nama : Ari irawansayah

NIM : 222014332

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Study : Akuntansi

Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal, 2019

Pembimbing I,

Dr. Sa'adah Siddik, S.E., Ak., M.Si., C.A. NIDN/NBM:0002095507/972321 Pembimbing N,

Lis Djuniar, S.E., M.Si. NIDN/NBM:0220067101

Mengetahui,

Dekan

u.b Ketua Program Studi Akuntansi

Betri Sirajuddin.S.E.,M.Si.,Ak.,CA NIDN/NBM: 0216106902/944806



PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Ari Irawansyah

NIM

: 222014332

Program Studi

: Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, 07-082019

Penulis



Ari Irawansyah

Abstract

Ari Irawansyah / 22 2014 332 / Analysis of Accountability and Transparency in Managing Village Fund Allocations (case studies in the village of Srigunung, Nusa Serasan, and Sumber Rejekt Kecamatan Sungal Lilin Kabupaten Musi Hanyuasin)

The objective of this study was to find out the accountability and transparency in managing village fund allocations at the village of Srigunung. Nusa Serasan, Sumber Rejekt. The data collection methods used in this study were documentation and observation. The analysis technique used was analyzing the description of the explanation based on theories. The results of the study showed that accountability and transparency in managing the village funds allocation had not fully followed the regulations that had been established, especially at Srigunung village.

Keywords: accountability and transparency

PENGESAHAN

NO. 496/Abstract BUMP/JX / 2016

Telah di Koraksi dah

Lembaga Balasa
Universita Managan Balasa
Universita Managan Balasa

PRAKATA



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul Analisis Akuntabilitas dan Tranparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Sri gunung, Desa Nusa Serasan, dan Desa Sumber Rejeki) ini dapat penulis selesai kan sebagaimana waktu yang dijadwalkan.

Variable akuntabilitas dan transparansi di pilih karena sangat berkaitan dengan peroses pengalokasian alokasi dana desa. dimana akuntabilitas dan transparansi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah. oleh karena itu, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sri gunung, Desa Nusa Serasan, dan Desa Sumber Rejeki Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin. Hasil penelitian ini adalah bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah desa sudah bisa dikatakan akuntabel terkecuali DesaSrigunung yang belum bisa dikatakan akuntabel karena belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Transparansi pemerintah DesaSrigunung, Desa Nusa Serasan, dan Desa Sumber Rejeki dari segi informatif, keterbukan maupun pengungkapan belum bisa dikatakan baik.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Saukani dan Ibuku Roviana, kakakku Adam Saputra dan adik-adikku KrisnaWijaya, danTomiSaputra serta seluruh keluarga besar serta saudara seperjuanganku yang dipertemukan karena Allah, yang selalu mendo'akan, memberikan motivasi dan inspirasi serta dukungan agar selalu menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pemimbingku Ibu DR.Hj.Sa'adah Sidik, S.E.,Ak.,M.Si.,CA dan Ibu Lis Djuniar, S.E.,M.Si yang telah sabar membimbing dan memberikan pengarahan serta saransaran yang tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan penelitian menjadi lebih baik lagi. Selain itu, disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam meyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

- Bapak DR. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas
 MuhammadiyahPalembang beserta staff dan karyawan/karyawati.
- Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan BisnisUniversitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan/karyawati.
- 3. Bapak Betri, S.E.,Ak.,M.Si.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan BisnisUniversitas Muhammadiyah Palembang.
- 4. Ibu Dewi Puspasari S.E. Selaku Pembimbing Akademik

 Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan BisnisUniversitas Muhammadiyah Palembang.

 Kepada aparat desa dan masyarakat desa srigunung, desa nusa serasan, dan desa sumber rejeki.

7. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari, meskipun banyakusaha telah penulis lakukan, akan tetapi skripsi ini masih jauh dari sempurna.Meskipun demikian mudah-mudahan dari skripsi ini tetap ada manfaat yang dapatdiperoleh. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2019

Penulis

Ari Irawansyah

DAFTAR ISI

	hala	aman
HALA	AMAN DEPAN	i
HALA	AMAN JUDUL	ii
HALA	AMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALA	AMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
HALA	AMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALA	AMAN PRAKATA	vi
DAFT	TAR ISI	vii
DAFT	FAR TABEL	viii
DAFT	TAR GAMBAR	ix
DAFT	FAR LAMPIRAN	X
ABST	TRAK	xi
ABST	TRACT	xii
BAB 1	I PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Rumusan Masalah	9
C.	Tujuan Penelitian	9
D.	Manfaat Penelitian	9
BAB 1	II KAJIAN PUSTAKA	11
A.	Landasan Teori	11
	1. Akuntabilitas (Accounability)	11
	a. Pengertian Laporan Keuangan	11
	b. Macam-macamAkuntabilitas	22

		c.	Aspek-aspekAkuntabilitas	13
	2.	Tr	asnparansi (transparency)	14
		a.	Pengertian Transparansi	14
		b.	KarakteristikTrasnparansi	15
	3.	Al	okasi Dana Desa	16
		a.	Pengertian Alokasi Dana Desa	16
	4.	As	sasPengelolaanKeuanganDesa	19
		a.	Transparatif	19
		b.	Akuntabel	20
		c.	Partisipatif	20
	5.	Per	ngelolaanKeuanganDesa	21
		a.	Perencanaan	21
		b.	Pelaksanaan.	21
		c.	Penatausahaan	21
		d.	Pelaporan	22
		e.	Pertanggungjawaban	23
B.	Pe	nelit	ian Sebelumnya	24
BAB	III N	MET	TODE PENELITIAN	
A.	Jer	nis F	Penelitian	28
B.	Lokasi Penelitian		29	
C.	Op	orasi	onal Variabel	29
D.	Da	ıta y	ang Diperlukan	30
E.	Me	etod	e Pengumpulan Data	30

F.	Analisis Data dan Teknik Data	32
	1. Analisis Data	32
	2. Teknik Analisis	32
BAB 1	IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A.	Hasil Penelitian	33
	1. Gambaran Umum ObjekPenelitian	33
	2. TugasPokokPelaksanaanPemerintahDesa	43
B.	Pembahasan Hasil Penelitian	59
BAB '	V SIMPULAN DAN SARAN	73
A.	Simpulan	73
B.	Saran	74
DAFT	TAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyatakan bahwa desa Adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuaan Republik Indonesia.

Pemberiaan otonom daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberiaan wewenang dan keleluasaan tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakan pada tingkat kabupaten atau kota, namun secara estensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan pusat ditingkat paling bawah, yaitu Desa selama ini, pembangunan masih banyak yang tergantung dari pendapatan asli daerah dan swadaya masyarakat yang jumlahnya maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.

Indonesia sendiri memiliki pembangunan di desa cukup menjadi perhatian bagi pemerintah daerah hingga pemerintah pusat, pembangunan desa tidak terlepas dari pembangunan kabupaten dan kota, sehingga perencanaan harus dibuat dengan apa yang direncanakan dan masyarakat berhak mengetahui perencanaan hingga pelaksanaan sampai pengawasan langsung terhadap kegiatan tersebut. Dalam upaya pembangunan desa, pemerintah harus mengalokasikan dana desa dengan jumlah tertentu untuk program yang akan dibuat.

Prinsip yang menjamin akses atau keterbatasan bagi setiap orang yang informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, peroses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil-hasil yang dicapai. Akuntasni pemerintah mengkhususkan kita untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang jalannya ini di akibatkan karena adanya tuntutan akuntabilitas dan transparasi publik tentang dana desa masyarakat yang dikelola pemerintah seharusnya menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, penilaian kinerja pemerintah. Dalam fungsi pengawasan fungsional efesien dan efektif. Selain itu juga akuntansi harus meliputi pengendalian atas pengeluaran anggaran serta kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah baik pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan adalah kurangnya pengendalian terhadap dana desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa, hal ini disebabkan oleh minimnya sumber daya yang ada dan masi minimnya tingkat pendidikan kepada desa/aparatur desa untuk mengelola dana yang demikian besar tersebut menjadi catatan penting agar penggunaan dana tersebut mendapat kawalan dari berbagai elemen baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.113 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan pertanggungjawaban keuangan penatausahaan, dan Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota, rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan atau konsekuensi antara penganggaran, pelaksanaan dan perencanaan, pengawasan.Berdasakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang asas pengelolaan keuangan desa yang dikelola berdasarkan asas-asas, akuntabel, transparan, dan partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin.

Akuntabilitas yang termasuk dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintah yang baik, (good govermence). Terselengaranya pemerintah yang baik merupakan persyaratan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk keharusan seseorang untuk menjamin

bahwa tugas dan kewajiban yang harus dilakukan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Transparasi juga yang dimaksudkan adalah pemberian pelayana publik yang bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Dikatakan Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Keterbukaan dan transparan berarti juga bahwa masyarakat dan aparatur pemerintah dapat mengetahui dan memperoleh data dan informasi dengan mudah tentang kebijaksanaan, program, dan kegiatan aparatur pemerintah yang baik di tingkat pusat maupun daerah, atau data dan informasi lainya yang tidak dilarang menurut perundang-undangan yang disepakati bersama. Penelitian tentang pengelolaan alokasi dana desa masi tergolong penelitian yang baru. Hasil dari beberapa penelitian terdahulu juga masi menunjukan bahwa adanya *Research Gap*.

Beberapa penelitian memperoleh hasil bahwaakuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa masih rendah sedangkan beberapa peneliti lain menunjukkan akuntabilitas dan transparasi alokasi dana desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu penelitian tentang akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa yaitu penelitian yang dilakukan oleh Furgani (2010) yang berjudul Pengelolaan Keuangan Desa dalam mewujudkan *Good Governance* (Studi Kasus pada Pemerintahan Desa Kalimo Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep) hasilnya menunjukkan bahwa akuntabilitas sangat rendah karena tanggung jawab tidak melibatkan

masyarakat dan BDP.Manopo (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pelaksanaan Akuntabilitas dalam Penyelanggaraan Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Warisa, Kecamatan Talawan, Kabupaten Minahasa Utara) juga menunjukkan bahwa pelaksanaa akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa di desa dirasakan masih lemah. Hal ini salah satunya terlihat pada tingkat informasi yang diterima oleh masyarakat tentang berbagai penyelenggaraan pemerintah di Desa Warisa masih rendah.

Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Lisa dan Nur (2017) yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang, hasilnya menunjukan bahwa berdasarkan peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa secara garis besar pengelolaan keuangan Desa telah mencapai akuntabilitas. Selain itu masih perlu adanya pendampingan dari pemerintah daerah yang instensif dalam membantu Desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.

Selain penelitian Lina dan Nur (2017) penelitian yang dilakukan oleh Dwi dan Taupik (2014) yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember juga menunjukan bahwa penerapan sistem akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Kecamatan UmbulSari Kabupaten Jember sudah Bedasarkan pada prinsip tanggunggugat maupun Prinsip tanggungjawab dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dengan demikian, perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Desa Srigunung, Desa Nusa Serasan, dan Desa Sumber Rejeki. Kecamatan Sungai Lilin berada di wilayah timur Kecamatan Sungai Lilin. disebelahutara berbatasan dengan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin. Kecamatan Sungai Lilin memiliki luas ± 885,28 km² yang kesemuannya itu merupakan dataran rendah dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 54.630 jiwa.Desa Srigunung, Desa Nusa Serasan, dan Desa Sumber Rejeki Kecamatan Sungai Lilin merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, potensi untuk membangun kesejahteraan masyarakat masih sangat banyak dan belum dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk peningkatan keuangan desa. dengan potensi yang ada dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dana desa, setiap tahunnya akan ada penambahan pembangunan yang diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat.

Tabel I.1 AnggaranPendapatandanAnggaranBelanjaDesa, DesaSrigunung, Desa Nusa Serasan, danDesaSumberRejeki Tahun 2017

No	Nama Desa	AnggaranPendapatan	Anggaran	%
			BelanjaDesa	
1	Desa Srigunung	Rp. 1.266.836.000	Rp. 1.266.836.000	100%
2	Desa Nusa Serasan	Rp. 1.447.000.000	Rp. 1.447.000.000	100%
3	Desa Sumber Rejeki	Rp. 1.341.800.000	Rp. 1.341.800.000	100%
	Jumlah	Rp. 4.055.636.000		

Sumber: Kantor Kecamatan Sungai Lilin, 2019

Pemerintah desa diharapkan akan mampu mengelola dana desa sesuai dengan peraturan Pemendagri bahwa pemerintah harus melaksanakannya sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi agar terwujudnya pemerintah yang baik bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Tabel I.1I RealisasiAnggaranPendapatandan Belanja, DesaSrigunung Desa Nusa SerasandanDesaSumberRejeki Tahun 2017

No	Nama Desa	Realisasi	Realisasi	%
		Pendapatan	Belanja	
1	Desa Srigunung	Rp. 1.266.836.000	Rp. 1.226.451.000	96,81%
2	Desa Nusa Serasan	Rp. 1.447.000.000	Rp. 1.398.650.000	96,65%
3	Desa Sumber Rejeki	Rp. 1.341.800.000	Rp. 1.289.800.000	96,12%
	Jumlah	Rp. 4.055.636.000		

Sumber: Kantor Kecamatan Sungai Lilin, 2019

Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, dan tenaga perlu pula dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian sehingga peneliti memilih Desa Srigunung, Desa Nusa Serasan, dan Desa Sumber Rejeki yang mendapatkan ADD di Kecamatan Sungai Lilin KabupatenMusiBanyuasin.

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian diatas peneliti berusaha menguji tingkat Akuntabilitas Pemerintah Desa antra lain Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum dimana di ketiga desa ini khususnya Desa Srigunung perangkat desanya belum sepenuhnya jujur dalam bekerja dan juga belum mentaati ketentuan hukum yang berlaku. dilihat dari Akuntabilitas Manajerial pengetiaan akuntabilitas manajerial sendiri adalah pertangguangjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan orgnisasi secara efesien dan efektif, dilihat dari ketiga desa ini akuntabilitas manajerial dalam hal pengelolaan pengalokasian dana desa belum efesien dan efektif hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuaan perangkat desa dikarenakan minimnya pendidikan perangkat desa itu sendiri sehingga pengelolaan pengalokasian dana desabelum efesien dan efektif. dilihat dari Akuntabilitas Program di

ketiga desa ini masih ada program-program yang belum terlaksana dikarenakan kurang nya perencanaan.dilihat dari Akuntabilitas Kebijakan di desa-desa ini belum mengikuti kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, juga masih ada keterlambatan dalam hal pelaporan dimana dijelaskan Permendagri 113 tahun 2014 bahwa pelaporanrealisasi semester pertama dilakukan mulai januari hingga bulan juni, dan pelaporannya disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan, akan tetapi khususnya di Desa Srigunung realisasi laporan akhir tahun masih dalam proses pengerjaan. Dan dilihat dari Akuntabilitas Finansial pertangguangjawaban perangkat desa atas penggunaan uang publik ataupun anggaran dari pemerintah pusat belum sepenuhnya dikelola secara ekonomi, efesien, dan efektif sehingga ada pemborosan dana dan juga terjadi defisit.

Dilihat dari Transparansi Desa Srigunung, Desa Nusa Serasan, dan Desa Sumber Rejeki, berdasarkan informasi warga kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa memang terjadi namun yang hadir hanya sedikit dikarenakan kendala pemahaman masyarakat bahwa pentingnya menyalurkan pendapatan guna pembangunan bersama. untuk keterbukaan terkait dana dan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan, tidak adanya bukti tertulis informasi yang bisa diakses masyarakat, bahkan kegiatan pemerintahan di ketiga desa tersebut terkesan tidak adanya kesibukan, berbeda dengan desa-desa lainnya yang ada di KecamatanSungai Lilin yang setiap harinya banyak tamu datang dari pemborong-pemborong untuk bekerja sama dalam kegiatan

pembangunan tersebut. Semua dana yang masuk dan keluar hanya diketahui oleh satu pihak saja, oleh sebabdiketigadesainibisadikatakantidaktransparan..

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus Pada Desa Srigunung, dan Desa Nusa Serasan, Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti membuat rumusan masalah bagaimanakah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Srigunung, Desa Nusa Serasan dan Desa Sumber Rejeki Kecamatan Sungai lilin, Kabupaten Musi Banyuasin?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desadi Desa Srigunung, Desa Nusa Serasan, Desa Sumber Rejeki Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik yaitu mengenai pentingnya prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa khususnya pada desa yang ada di KecamatanSungai Lilin.

2. Bagi Pemerintah Desa

Bagi aparatur desa diharapkan penelitian ini akan bermanfaat dalam mengambil setiap kebijakan dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk dapat meningkatkan akuntabilitas maupun transparansi, sehingga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat dan masyarakat desa di Kecamatan Sungai Lilin.

3. Bagi Almamater

Diharapkan dapat menjadi referensi bahan kajian mahasiswa lain dan menjadi pertimbangan penting bagi penelitian yang serupa, pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Irma.(2015). Akuntabilitas Pengelolan Alokasi Dana Desa (ADD) Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *E-Journal katalogis*. Vol 3 No 1Januari 2015. Hal 121-137
- Anwar, Sanusi (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Keempat. Jakarta Penerbil Salemba empat
- Danang Sunyoto. (2011). *Metode Penelitian Untuk Ekonomi*. Cetakan Pertama Yogyakarta:CAPS
- Dwi Febri Afrianto. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol.2 No 3.Tahun 2014 Hal 473-485 di akses tanggal 7 November 2018, http://www.researchgate.net/publikcation/319108371
- Eni Dwi Susliyanti. (2016). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi pada desa trymulyo kecamatan jetis, kabupaten bantul tahun 2015). *Vorum keuangan dan bisnis V*, tahun. 2016. Hal 261-271. ISBN: 978-602-17225-6-5
- Lina Nasehatun Nafidah, Nur Anisa. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi* Vol.10 No.2, Oktober 2017 Hal 273-288 journal.uinjkt.ac.id/index/php-akuntabiliras,. Di Akses Tanggal 7 November 2018
- Mahmudi. (2015). Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Erlangga: Jakarta
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit ANDI; Yogyakarta
- Made Wiradama Setiawan. (2017). Analisis transparasi dan akuntabilitas pelaporan keuangan alokasi dana desa. *E-Jouernal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurnal Akuntansi Program S1*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2017, Hal 1-11 Diakses 7 November 2018.
- Peraturan Mentri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014).
- Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (1-2). (2014).

- Rahmi Fajri. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (studi pada kantor desa ketindan, kecamatan lawang, kabupaten malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol. 3.No. 7. Hal 1099-1104*.
- Siti Ainul Wida, Dkk. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogo jampi Kabupaten Banyuwangi. *E-journal ekonomi bisnis dan akuntansi* 2017, Volume 4 No 2 Hal: 148-52
- Sugiono. (2016). Metode Penelitian Bisnis. Bandung:CV. Alfabeta.
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa BAB VIII Tentang Keyangan dan Aset Desa.
- V. Wiratna, Sujarwenni (2015). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta Pustaka Baru Pers.
- V. Wiratna, Sujarwenni (2015). Metode Penelitian: lengkap, Praktis, dan Mudah dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press